

ABSTRAK

Kegiatan pembiayaan yang dilakukan Columbia Finance seharusnya dibingkai dengan suatu perjanjian yang jelas, tegas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak rawan sengketa. Tetapi kenyataannya, kegiatan pembiayaan tersebut hanya dibingkai dengan suatu perjanjian dibawah tangan yang dibuat secara sepihak oleh Columbia Finance, bahkan didalam perjanjiannya memuat klausula baku yang bertujuan untuk memberi perlindungan sepihak kepada Columbia Finance dengan mengalihkan tanggung jawab Columbia Finance sebagai pelaku usaha kepada konsumen.

Klausula baku yang dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 3 angka (6) Perjanjian Pembiayaan Konsumen, khususnya dalam kalimat "...dan Pihak Kedua (Konsumen) tidak dapat menggunakan alasan-alasan lain atau peristiwa-peristiwa apapun juga termasuk karena keadaan memaksa (*overmacht*) yang terjadi pada Pihak Kedua untuk menunda pembayaran angsuran tersebut ...".

Hal tersebut diatas telah menyimpangi ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini karena klausula baku pasal 3 angka (6) tersebut diatas mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha (Columbia Finance) kepada konsumen, khususnya tanggung jawab dalam menanggung risiko atas terjadinya *overmacht* yang memusnahkan objek perjanjian. Sedangkan ditinjau dari prinsip kepatutan, keberlakuan klausula baku tentang *overmacht* tersebut diatas adalah tidak patut untuk diberlakukan, mengingat tidak adanya itikad baik, yang terlihat dari ketidaksetaraan kedudukan antara Columbia Finance sebagai pelaku usaha dengan Konsumen, dan Columbia Finance sebagai "pihak yang lebih dominan" memanfaatkan hal tersebut untuk membuat klausula baku yang lebih mengutamakan kepentingan dan perlindungan bagi pihaknya.

Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen manakala terjadi *overmacht* yang memusnahkan barang-barang elektronik sebagai objek perjanjian, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, yaitu konsumen dapat menempuh dua alternatif penyelesaian sengketa, yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

ABSTRACT

Financial activity by Columbia Finance should be framed with a distinct firm agreement which it in accordance with the valid rule to avoid controversy. But, a reality, that Financial act was merely covered with an illegal agreement made by only one party, Columbia Finance. It is even stated in the agreement, the main article which provide one side protection, Columbia Finance by converting its responsibility as an entrepreneur into the customer.

The interled main article is, as included in article 3 number (6) the agreement of consumer's cost, especially in the sentence " ...and the second party (Consumer) can not reason any events including overmatch occurring to second party to delay the installing payment."

The case above has deviated the rule of article 18 verse (1) letter (a) law number 8, 1999 on Consumer Protection. This happens because the main article 3 number (6) above, convert the responsibility in taking risk when there is, overmacht which eliminate the agreement object. Meanwhile, if it is viewed from fairness principle, the validity of the main article about overmacht above can not properly be put into effect. Regarding the absence of good will, which can be seen from the unequaled state between Columbia Finance as "the more dominant party" makes use of it, create main article giving more priority and protection for its party.

The law protection provided to the customer whenever there is in overmacht which eliminates electronic devices as the agreement object, as arranged in article 45 verse (1) law number 8, 1999 about the customer's protection in which consumer can get both alternative solution the dispute through trial, Out of court and in the court.